

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Tenaga Kerja**

Penduduk tenaga kerja yaitu yang berada dalam usia kerja. Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, setiap orang yang sanggup melaksanakan pekerjaan demi memproduksi barang maupun jasa demi mencukupi kebutuhan masyarakat ataupun kebutuhan sendiri disebut sebagai tenaga kerja. Pada tahun 1970-an badan pusat statistik menetapkan batasan usia kerja apabila penduduk berusia 10 tahun lebih. Usia kerja dibatasi minimal 15 tahun, kebijakan ini dirubah sejak dilakukannya Survei Angkatan Kerja (SAKERNAS). Kebijakan SAKERNAS ini dilakukan karena adanya anjuran dari *International Labour Organization (ILO)*.

Sumarsono (2003) beranggapan bahwa setiap hubungannya dengan perilaku penduduk, dan pasar tenaga kerja dipisahkan menjadi dua kelompok, yakni kelompok ekonomis yang aktif dan kelompok dinamis yang aktif ini termasuk bukan angkatan kerja. Pada kelompok ini termasuk didalamnya adalah masyarakat yang menawarkan tenaga kerjanya dan serta hasil perolehan dipasar tenaga kerja namun belum berhasil mencapai

perolehannya. Beberapa konsep ketenagakerjaan yang berlaku secara umum (Nainggolan, 2009):

**a. Tenaga Kerja (*Manpower*) atau Penduduk Usia Kerja**

Tenaga kerja ialah penduduk yang bekerja berusia 15 tahun lebih atau semua jumlah penduduk disuatu negara atau daerah yang bisa menghasilkan atau memproduksi barang dan jasa apabila adanya permintaan terhadap jasa dari tenaga kerja, dan apabila tenaga kerja ingin berkontribusi atau ikut partisipasi didalam kegiatan tersebut.

**b. Angkatan Kerja (*Labor Force*)**

Angkatan kerja ialah termasuk bagian dari tenaga kerja yang sebenarnya terlibat atau berusaha terlibat dalam aktivitas pembuatan barang dan jasa, maka yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk yang aktivitas utamanya selama seminggu yang lalu bekerja dan penduduk yang lagi mencari pekerjaan. Angkatan kerja yang masuk bagian bekerja apabila minimum bekerja dalam waktu satu jam selama seminggu kemudian dilakukan penghitungan sesudah kegiatan produktif. Jadi melalui persamaan identitas tenaga kerja bisa diformulasikan sebagai berikut:

$$AK = K + MP.$$

Dalam bahasa ekonomi penjumlahan angka angkatan kerja yaitu penawaran angkatan kerja (*labour supply*). Yang termasuk kedalam bagian permintaan (*labour demand*) adalah tenaga kerja atau penduduk yang berstatus sebagai pekerja.

**c. Bukan Angkatan Kerja (*Unlabour Force*)**

Penduduk yang berusia lima belas tahun lebih yaitu bukan angkatan kerja, namun selama satu minggu yang lalu aktivitas utamanya yaitu bersekolah, mengurusin rumah tangga serta yang lain. Jika orang yang masih bersekolah, selama satu minggu yang lalu bekerjanya paling tidak sejam, namun aktivitas utama ialah bersekolah, bahwa pribadi tersebut tentu bukan termasuk golongan angkatan kerja. Tidak sedikit jumlah mereka yang tercantum dan kemungkinan besar akan masuk kedalam pergantian masa sekolahnya yang akan berlanjut sampai tingkat pendidikan yang makin tinggi atau termasuk dalam bagian bukan angkatan kerja (BAK). Jadi jumlah usia (UK) ketika dilihat melalui persamaan identitas yaitu sebagai berikut:

$$UK = AK = BAK$$

**d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*Labour Force Participation Rate*)**

Tingkat partisipasi angkatan kerja ialah suatu kelompok umur yang menjelaskan jumlah angkatan kerja sebagai bagian manusia yang termasuk golongan umur tersebut, yakni membandingkan tenaga kerja dengan angkatan kerja. Untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) bisa menggunakan rumus dibawah ini:

$$TPAK = \frac{AK}{UK} \times 100\%$$

## 2. Upah

Upah pada dasarnya merupakan akar utama pendapatan manusia. Manusia yang kerja tentunya bertujuan ingin memperoleh upah. Karna upah tersebut akan digunakan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, maksud dari upah berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 pasal 30 ayat 1 yaitu hak yang bekerja maupun yang diterima buruh dan dinyatakan dalam bentuk uang untuk imbalan dari pengusaha ataupun yang telah memberi pekerjaan oleh pekerja, atau cantuman dalam undang-undang termasuk bantuan bagi buruh maupun yang bekerja serta keluarganya atas sesuatu kerjaan dan jasa yang akan dilakukan. Memberi upah kepada tenaga kerja dalam sesuatu aktivitas produksi umumnya berupa imbalan ataupun membalas jasa dari para produsen oleh tenaga kerja atas kreatifnya yang diberikannya dalam aktivitas produksinya. Pemberian upah bergantung (Sulistiawati, 2012)

- a. Biaya kebutuhan hidupnya minimum pekerja dan keluarga.
- b. Kebijakan undang-undang yang memikat mengenai upah minimum pekerja.
- c. Kreativitas marginal tenaga kerja.
- d. Tekanan yang telah diserahkan kepada serikat buruh dan pengusaha.
- e. Perbedaan jenis kerja.

Upah yang diterimanya kepada para kerja telah dibedakannya menjadi 2 (BPS):

- 1) Upah nominalnya ialah upah yang diterimanya sebagai balas jasa kerja yang sudah dilakukan.
- 2) Upah riil dihitung dari besar upah nominal dibagi dengan indeks harga konsumen (IHK). Upah riil menjelaskan daya beli dari perolehan atau upah yang telah diterima buruh.

Di Indonesia untuk pengupahan biasanya didasarkan oleh tiga fungsi upah (Sumarsono, 2003):

- a) Memberi hidup yang layak pada para kerja serta keluarga.
- b) Memberikan balasan dari hasil pekerja seseorang.
- c) Memfasilitasi insentif demi meningkatkan produktifitas tenaga kerja.

### **3. Upah Minimum**

Upah minimum merupakan upah paling rendah yang menurut undang-undang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 05 Tahun 1989, UMK adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberi upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjaan pada suatu kabupaten atau kota pada suatu tahun tertentu. Penetapan UMK dilakukan oleh gubernur yang penetapannya harus lebih besar dari UMP. Penetapan upah minimum ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan di

tetapkan selambat-lambatnya 40 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum yaitu 1 Januari.

Kebijakan upah minimum untuk melindungi upah tenaga kerja agar tidak merosot pada tingkat upah yang rendah, akibat ketidak seimbangan pasar tenaga kerja sejak awal tahun 1969. Kebijakan ini juga dalam rangka upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Penetapan upah minimum didasari oleh Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) pada awal tahun 1996-2006 dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada tahun 2007 hingga saat ini (Silalahi, 2008). Selain itu penetapan upah minimum juga memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, untuk menyesuaikan kemampuan perusahaan.

#### **4. Upah Minimum Kabupaten/Kota**

Penetapan upah minimum di setiap provinsi berbeda-beda besarnya. Karena tingkat keperluan hidup di setiap provinsi berbeda. Misalnya, di provinsi Jawa Tengah penetapan upah minimum memakai sistem upah minimum kabupaten/kota (UKM). Upah minimum kabupaten/kota ialah upah yang berlaku di daerah kabupaten/kota. Penetapan UKM dilakukan oleh Gubernur, yang penetapannya harus semakin besar dari upah minimum provinsi. Penetapan UKM dilakukan setiap 1 tahun sekali dan ditetapkan paling lambat 40 hari sebelum tanggal berlakunya yakni tanggal 1 Januari.

## **5. Produk Domestik Regional Bruto**

kemajuan ekonomi daerah mencerminkan situasi perekonomian di satu daerah. situasi perekonomian ini akan mempengaruhi kemajuan dan kondisi perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Semakin meningkat pertumbuhan perekonomian di suatu daerah dan semakin besar pula kesempatan berkembang bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut. Ukuran suatu pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari nilai produk domestik regional bruto (PDRB).PDRB yaitu penjumlahan nilai output akhir perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu. PDRB terbagi menjadi dua jenis yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) dan atas dasar harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu negara.

## **6. Indek Pembangunan Manusia (IPM)**

Di Indonesia penduduk bertambah dikarenakan adanya kelahiran dan umur harapan penduduk yang semakin meningkat. Penduduk sendiri bisa dikelompokkan terdiri dari 2 bentuk, yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Sementara, penduduk angkatan kerja termasuk bekerja dan juga tidak bekerja. Keadaan penduduk angkatan kerja yang bekerja ini membantu dalam

peran baik buruknya terhadap keadaan ketenaga kerjaan. Kualitas ketenaga kerjaan ini adalah bagian indikator kualitas sumber daya manusia untuk membentuk (IPM).

## **B. Hubungan Antar Variabel**

Hubungan antar variabel dibutuhkan untuk mengetahui korelasi antara variabel dependen dengan variabel independen.

### **a. PDRB terhadap TPAK**

Produk domestik regional bruto mampu mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dengan asumsi jika nilai PDRB meningkat maka jumlah nilai output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi di suatu daerah akan meningkat. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan. Hal tersebut secara langsung dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

### **b. UMP terhadap TPAK**

Menurut *efficiency wage theory* dalam Sumarsono (2009), bahwa penetapan upah minimum memungkinkan tenaga kerja meningkatkan nutrisinya sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitasnya. Hubungan tenaga kerja dengan upah minimum dapat dilihat pada model dua sektor, dimana dikembangkan oleh Welch (1974)

adalah perluasan dari model kompetitif. Model ini mengasumsikan bahwa terdapat dua sektor di dalam ekonomi (segmentasi ekonomi) yaitu sektor formal (yang tercover oleh kebijakan upah minimum) dan sektor informal (sector yang tercover oleh kebijakan upah minimum) dengan mobilitas yang sempurna antar dua sector tersebut. Seandainya kemudian ada kebijakan upah minimum pada sektor formal yang lebih tinggi dibandingkan bahwa antara stabilitas harga dan kesempatan kerja yang tinggi tidak mungkin terjadi secara bersamaan, yang berarti bahwa jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi atau tingkat pengangguran rendah, sebagai konsikueensinya harus bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi.

**c. IPM terhadap TPAK**

Indek Pembangunan Manusia adalah konsep yang fokus pada manusia jadi dinamakan pembangunan manusia, karena manusia harus memiliki kemampuan untuk mencapai tiga hal yaitu kesehatan, pendidikan dan konsumsi. Jika manusia sudah memiliki tiga hal tersebut maka semakin baik pula Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja maka partisipasi akan semakin meningkat.jadi ketika manusia yang mempunyai pendidikan yang bagus maka akan mendapatkan perkerjaan yang layak.

#### **d. APS terhadap TPAK**

Menurut Tirtarahardja dan Sulo (2005) menjelaskan pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan kerja pada calon luaran. Kemudian khusus pada tingkat perguruan tinggi Mankiw memiliki teori khusus mengenai tenaga kerja tersebut. Perusahaan manufaktur memproduksi barang dan jasa yang kelak akan dikonsumsi dan investasi dalam modal fisik. Mempengaruhi TPAK karna semakin tinggi APS jadi pendidikannya menjadi bagus dan minat untuk bekerja semakin tinggi. Jika seseorang punya pendidikan yang bagus maka bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus.

#### **C. Penelitian terdahulu**

Dalam penelitian Andriani (2016) yang menyatakan bahwa metode analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah panel data fixed effect. Dalam model tersebut digunakan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita sebagai variabel yang dijelaskan, sedangkan variabel penjelasnya terdiri dari pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan dasar dan menengah, serta upah minimum provinsi. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita, tingkat pendidikan dasar berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita, tingkat

pendidikan menengah tidak berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita, upah minimum provinsi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita.

Sementara dalam penelitian Dini (2014) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah, pendidikan wanita muda, pendapatan orang tua, pendidikan orang tua, status sekolah, status pekerjaan, dan lingkungan sosial terhadap partisipasi angkatan kerja wanita muda dalam kegiatan ekonomi Kota Makassar. Data penelitian tersebut diperoleh dari kuesioner (primer) dan beberapa observasi wawancara langsung dengan tenaga kerja wanita muda. Dari hasil penelitian diperoleh menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif signifikan, pendidikan berpengaruh positif signifikan, pendapatan orang tua/non labour income berpengaruh negatif signifikan, pendidikan orang tua berpengaruh negatif tidak signifikan, status sekolah berpengaruh positif signifikan, status pekerjaan berpengaruh negatif signifikan, dan lingkungan sosial berpengaruh positif signifikan. Ada perbedaan antara partisipasi angkatan kerja wanita muda yang tinggal di lingkungan sosial kumuh dan tidak kumuh.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2017) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Provinsi dan Investasi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pulau Kalimantan pada tahun 2006-2015. Data yang digunakan merupakan data sekunder, berasal dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari

empat provinsi dengan model regresi Fixed Effect. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Upah Minimum Provinsi berhubungan negatif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Herlina (2014) juga meneliti mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Siak, dalam penelitiannya dia menemukan bahwa pendidikan dan upah mempunyai pengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di kabupaten siak. Data dalam penelitian tersebut dianalisis menggunakan model regresi linear berganda.

Penelitian Hidayat (2017) juga menjabarkan terkait dengan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan antar kabupaten di Provinsi Riau. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Jumlah penduduk mengurus rumah tangga dan jumlah penduduk usia sekolah memiliki berpengaruh negatif secara signifikan terhadap TPAK perempuan yang artinya dapat menurunkan TPAK, Variabel pendidikan memiliki hubungan positif terhadap TPAK perempuan tetapi tidak secara signifikan dan apabila dengan tingkat keyakinan 90% maka, pendidikan berpengaruh positif secara signifikan terhadap TPAK perempuan. Faktor yang paling dominan yang mempengaruhi TPAK

perempuan antar kabupaten di Provinsi Riau adalah jumlah penduduk mengurus rumah tangga.

Dalam penelitian Izzah (2015) juga menganalisis dampak kenaikan upah minimum provinsi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan kenaikan Upah Minimum Provinsi dapat menurunkan tingkat pengangguran dan menaikkan tingkat partisipasi angkatan kerja di Jakarta. Untuk menurunkan tingkat pengangguran di Jakarta maka sebaiknya upah minimum provinsi besarnya selalu disesuaikan dengan standar hidup yang layak. Menurunnya tingkat pengangguran akan berdampak luas terhadap masalah sosial, ekonomi, dan keamanan di Jakarta.

**Tabel 2.1**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Metode Analisis</b>	<b>Kesimpulan</b>
1. Nieke Andriani, 2016	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGAR UHI TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA WANITA DI 30 PROVINSI INDONESIA PERIODE 2009-2013	TPAK wanita, PDB, Tingkat Pendidikan dasar dan menengah, UMP	<i>Panel data fixed effect</i>	PDB positif signifikan, Tingkat pendidikan dasar positif signifikan, tingkat pendidikan menengah tidak signifikan, UMP negatif signifikan terhadap TPAK wanita.
2. MONICA CAHYA DINI, 2014	FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGAR UHI	TPAK wanita, Upah, pendidikan wanita	<i>Observation</i>	Pendapatan, pendidikan, status sekolah, lingkungan

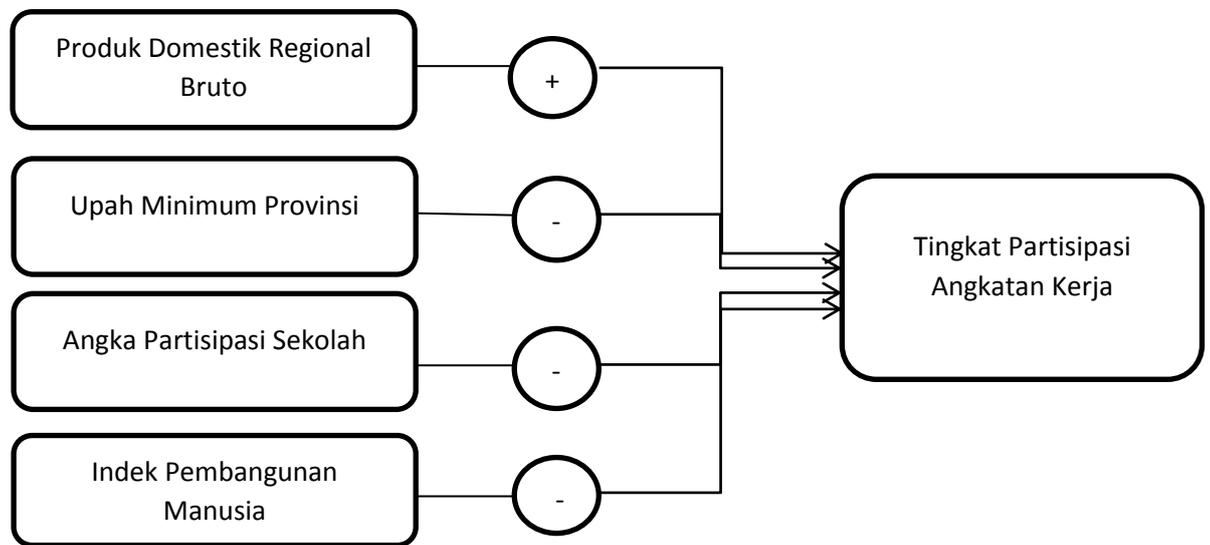
	PARTISIPASI ANGKATAN KERJA WANITA MUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI KOTA MAKASSAR	muda, pendapatan orang tua, pendidikan orang tua, status sekolah, status pekerjaan, dan lingkungan sosial.		sosial berpengaruh positif terhadap TPAK. pendapatan orang tua/non labour income, status pekerjaan, pendidikan orang tua berpengaruh negatif signifikan terhadap TPAK.
3. Arizka Sofiyana Maharani, 2017	Analisis Faktor- faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pulau Kalimantan.	TPAK, PDRB, Upah Minimum Provinsi, dan Investasi.	<i>Panel data fixed effect</i>	PDRB, Penanaman Modal Asing berpengaruh berpengaruh positif signifikan terhadap TPAK. Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif signifikan terhadap TPAK.
4. Herlina, 2014	Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi TPAK Perempuan di Kabupaten Siak	TPAK perempuan, Pendidikan dan Upah	Regresi Linear Bergand a	Pendidikan dan upah mempunyai pengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di kabupaten siak.
5. Aysit	<i>Economic</i>	Tingkat	<i>Time</i>	Secara

Tansel	<i>Development and Female Labor Force participation in Turkey</i>	partisipasi angkatan kerja wanita, PDRB, PDRB per kapita, pengangguran	<i>Series</i>	bersama-sama seluruh variabel independen mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja wanita
6. Hidayat, 2017	Analisis yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan antar kabupaten di Provinsi Riau	Jumlah penduduk mengurus rumah tangga, jumlah penduduk usia sekolah, pendidikan.	<i>Panel data Fixed effect</i>	Jumlah penduduk mengurus rumah tangga dan jumlah Jumlah penduduk usia sekolah memiliki berpengaruh negatif secara signifikan terhadap TPAK. Pendidikan memiliki hubungan positif terhadap TPAK
7. Kerstin Johansson	<i>Do labor market affect labor force participation</i>	<i>Labor supply, Labor market program</i>	<i>Panel Data</i>	Program di pasar tenaga kerja justru berpengaruh pada berhentinya tenaga kerja
8. Imaam Buchari.	Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur Di Pulau Sumatra	Penyerapan Tenaga Kerja (PTK), Upah Minimum Provinsi (UMP), Pendidikan.	<i>Fixed effect.</i>	Bahwa upah minimum provinsi memiliki arah koefisien negatif. Sedangkan tingkat pendidikan tenaga kerja

	Tahun 2012-2015.			berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di pulau sumatra periode 2012-2015. Upah minimum provinsi dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di pulau sumatra tahun 2012-2015.
--	------------------	--	--	---

#### D. Kerangka Berfikir

Pada pembahasan kali ini, penulis akan memaparkan mengenai model penelitian yang menjadi dasar pemikiran dalam melihat hubungan antara TPAK dengan variabel-variabel independen dalam model. Selanjutnya, informasi mengenai model penelitian adalah sebagai berikut:



**Grafik 2.1**

Skema Model Penelitian

### E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat membangun hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2010-2015.
2. Diduga Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2010-2015.
3. Diduga Angka Partisipasi Sekolah berpengaruh positif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2010-2015.
4. Diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2010-2015.